

Pengaruh APBN, Kebijakan fiskal, Hutang Dalam Pertumbuhan Ekonomi Dimasa Pandemi

Syamfitri Nur Cahyani, Vivi Safitri, Yulizar Tri Nanda,
fitrisyam438@gmail.com, vivisafitri5@gmail.com, Yulizartrinanda39@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 membuat perekonomian didunia merosot, penghasilan menurun, tingkat kematian bertambah semakin cepat, kelaparan terjadi dimana-mana. Dalam hal ini Pemerintah membuat Kebijakan guna membantu pertumbuhan perekonomian dimasa pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan Pengaruh APBN, kebijakan fiskal, hutang dalam pertumbuhan ekonomi dimasa pandemi. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan menganalisis karya jurnal yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaruh APBN, kebijakn fiskal, dan hutang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi dimasa pandemi.

Kata Kunci : Pandemi, APBN, kebijakan fiskal dan Hutang, Ekonomi

A. PENDAHULUAN

Pandemi virus corona juga menyebabkan negara-negara Afrika bereaksi dengan agresif strategi kebijakan publik untuk memitigasi dampak negatif krisis terhadap perekonomian nasional. Tanggapan kebijakan moneter dan fiskal terhadap pandemi telah termasuk pusat pemotongan suku bunga kebijakan bank dan pelonggaran kuantitatif, relaksasi aturan utang dan defisit, pengeluaran prioritas ulang, alokasi dana ekstra-anggaran untuk respons pandemi, uang tunai transfer, bantuan makanan dan bantuan sosial langsung lainnya untuk rumah tangga yang rentan dan dukungan untuk usaha kecil dan menengah (Dzigbede & Pathak, 2020).

Wabah COVID-19 yang sedang berlangsung menyebabkan gangguan yang meluas di negara-negara maju di dunia ekonomi. Otoritas moneter dengan cepat bereaksi, dengan Federal Reserve dan lainnya bank sentral utama segera mengaktifkan kembali toolkit Krisis Keuangan 2008-2009 mereka. Mengikuti langkah-langkah ini, otoritas fiskal di seluruh dunia mulai merancang dan mengimplementasikan stabilisasi paket tion untuk membantu mempertahankan neraca rumah tangga dan perusahaan. Dalam hal ini mengadaptasikan model makroekonomi untuk mensimulasikan efek makroekonomi dari pandemi dan mempelajari efek dari berbagai jenis instrumen kebijakan fiskal. Pandemi dimodelkan sebagai penghentian tiba-tiba dari sektor layanan intensif kontak. Melalui permintaan agregat eksternalitas, penutupan sektor ini merambat ke sektor non-jasa.

Penurunan ekonomi yang tajam adalah ekonomi yang terkait dengan Pandemi covid19. Dengan sedikit stimulus moneter yang tersedia, dan tingkat utang bersejarah masa damai yang tinggi pada akhirnya menahan fiskal tanggapan, pembuat kebijakan dipaksa untuk berjalan di garis tipis antara menjalankan stimulus ekonomi dan mempertahankan keyakinan itu dalam jangka panjang solvabilitas fiskal tidak terancam. Pembahasan beberapa pendek-dan potensi konsekuensi jangka panjang dari pandemi di dunia ekonomi, membandingkan "kejutan COVID-19" dengan Keuangan GlobalCrisis (GFC), dan membahas tanggapan kebijakan. Aturan kebijakan fiskal adalah dibahas dan bagaimana implementasi aturan untuk mencapai target solvabilitas fiskal jangka menengah sekaligus memberikan ruang kebijakan untuk skala besar stimulus fiskal jangka pendek dalam menghadapi guncangan ekonomi besar seperti: COVID-19 adalah strategi kebijakan yang diinginkan (Hutchison, 2020).

Pandemi virus corona telah mendatangkan malapetaka luar biasa di negara-negara di seluruh dunia, mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dan gangguan parah pada sistem ekonomi dan mata pencaharian. Selain itu, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan kontraksi drastis ekonomi global pertumbuhan dan memprediksi hasil pertumbuhan yang lebih ketat untuk pendapatan rendah dan menengah negara, terutama di sub-Sahara Afrika. Negara-negara Afrika telah mengoordinasikan intervensi kesehatan masyarakat besar-besaran dalam menanggapi Pandemi COVID-19, termasuk deklarasi darurat Nasional dengan jam malam dan pembatasan penguncian, pelatihan tenaga medis, penyediaan medis penting peralatan dan perlengkapan untuk petugas kesehatan, mendirikan bangsal khusus di rumah sakit untuk perawatan untuk pasien corona virus, memperkuat pengawasan,

diagnostik dan perawatan klinis melalui rapid test, contact tracing, karantina, isolasi dan pengobatan, serta public kampanye informasi kesehatan, semua dengan tujuan memperlambat penyebaran virus corona dan mengurangi jumlah kematian yang tak terbayangkan di negara-negara.

Melalui keterkaitan neraca, juga merambat ke sektor keuangan. Meningkatnya pengangguran mengarah ke gelombang default, mengganggu intermediasi keuangan dan memperkuat resesi. Guncangan pandemi menghasilkan lonjakan besar dalam tingkat pengangguran, seperti dalam data, rumah tangga peminjam, yang sebagian besar pendapatannya berasal dari pekerjaan dan bergantung pada bank kredit untuk mendanai konsumsi, adalah kelompok yang paling terpengaruh. Asumsi bahwa ada endogen masuk dan keluar di sektor yang terkena dampak, yang berarti bahwa fluktuasi permintaan dapat memiliki efek persisten dalam kapasitas produktif sektor ini dan ekonomi tidak segera pulih setelah pandemi berakhir (Faria-e-Castro, 2021). Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Keuntungan ini bisa mendatangkan umat Islam untuk memberikan peran dengan bermacam bentuk maupun model filantropi. Terdapat perintah untuk berinfak sedekah, zakat dan wakaf yang akan menimbulkan keterkaitan selain peningkatan iman kepada Allah, meningkatkan rasa kemanusiaan, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menebarkan keharmonisan bersosialisasi, membersihkan harta yang dimiliki, dan juga dapat mengatasi bermacam permasalahan di dalam kehidupan ekonomi, sosial, lingkungan dan lingkungan² serta aspek kehidupan lainnya (Wullan et al., 2021). Tujuan dari jurnal ini ingin menelaah Pengaruh APBN, Kebijakan fiskal, Hutang Dalam Pertumbuhan Ekonomi Dimasa Pandemi. Dalam pertumbuhan Ekonomi, dimasa pandemic saat ini, memang perlu dihadirkan sebuah kebijakan, guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi.

B. LANDASAN TEORI

I. Pertumbuhan Ekonomi

Sukses dalam pembangunan adalah hal yang utama sasaran program pemerintah suatu negara untuk membawa negaranya menuju kemajuan, di mana Negara yang mengalami optimal perkembangan dapat dilihat dari segi bagaimana sukses pemerintah dalam mempromosikan perubahan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi hampir tidak dapat dipisahkan dari peran lembaga perbankan yang menengahi setiap transaksi negarakegiatan pembangunan di mana ada kausalhubungan antara perkembangan sektor keuangan dan pertumbuhan negaraekonomi ketika ekonomi riil mengalami

pertumbuhan, penggunaan jasa keuangan akan meningkatkan. Hal ini sejalan dengan Harrod-Domarteori pertumbuhan yang menyatakan bahwa ekonomi pertumbuhan membutuhkan investasi atau modal yang memadai modal untuk membiayai pembangunan Negara. investasi yang memadai dalam pembiayaan pembangunan akan meningkat secara signifikan jika ekonomi kondisi suatu negara cenderung stabil (Onainor, 2019).

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan khususnya dibidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dikaji prosesnya melalui dua pendekatan, yaitu pertumbuhan ekonomi melalui lapangan usaha dan pertumbuhan ekonomi melalui sumbangan daerah-daerah administrasi dibawahnya. Pendekatan tersebut secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi (Lestari et al., 2021).

Ada komponen utama atau tiga faktor dalam pertumbuhan ekonomi dalam setiap negara. Ketiga faktor tersebut adalah: (1) kemajuan teknologi (2) akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia dan (3) pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi menjadi suatu hal yang sangat kompleks untuk dibahas, Karena bisa dikaitkan dengan beberapa indikator-indikator yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu foreign direct investment, inflasi dan tenaga kerja (Juwita et al., 2021). Pertumbuhan ekonomi hampir tidak dapat dipisahkan dari peran lembaga perbankan yang menengahi setiap transaksi Negara kegiatan pembangunan di mana ada kausal hubungan antara perkembangan sektor keuangan dan pertumbuhan negara ekonomi ketika ekonomi riil mengalami pertumbuhan, penggunaan jasa keuangan akan meningkatkan (Wahid et al., 2020).

Dampak APBN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dimasa Pandemi

Pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19 telah menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional. Kerugian itu hanya akan tertutupi apabila krisis dapat diakhiri sebelum menimbulkan kebangkrutan usaha secara massal. Hal ini disebabkan PSBB telah diberlakukan secara luas, dan terus bertambah, sehingga perhitungan yang hanya menggunakan acuan Jabodetabek menjadi tidak valid. Kerugian Sektor Kerugian ekonomi secara nasional akan mempengaruhi APBN. Dampak yang paling mudah dihitung adalah kerugian agregat secara nasional. Namun karena bersifat makro, maka perhitungan ini hanya digunakan oleh pelaku ekonomi skala besar, atau oleh negara dalam

menyusun (revisi) APBN. Salah satu cara menghitung dapat menggunakan acuan Produk Domestik Bruto (PDB), yang merupakan akumulasi total produksi di sebuah negara selama setahun.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 semula diperkirakan sebesar 5,3%, Namun angka ini terkoreksi sebagai dampak pandemi Corona, dan sebagian kalangan memprediksikan pertumbuhan di bawah 2%. Mengingat terjadi ketidakpastian dan prediksi berbeda-beda, serta terjadi fluktuasi kurs USD (peningkatan drastis menjadi Rp 16.000 p-er USD pada awal April 2020), maka penulis memilih untuk mengabaikan kedua faktor tersebut, yakni pertumbuhan ekonomi Januari-April 2020 dan kurs USD pada masa krisis. Sehingga angka PDB yang digunakan pada tulisan ini adalah acuan 2019. Jadi berapa kerugian ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19? Ada 2 pilihan dalam menghitung kerugian. Cara pertama menggunakan asumsi perputaran uang di Jabodetabek sebesar 70% dari total uang beredar di Indonesia. Apabila ini diartikan 70% PDB Indonesia dipengaruhi pergerakan ekonomi di Jabodetabek, maka penghentian aktivitas secara total di Jabodetabek selama 1 bulan akan menimbulkan kerugian nasional sebesar $= 1/12 \times 70\% \times \text{Rp } 15.833 \text{ Triliun} = \text{Rp } 923 \text{ Triliun}$. Namun apabila penghentian itu tidak total karena masih ada beberapa jenis kegiatan yang tidak dilarang beroperasi, seperti sektor kesehatan, makanan pokok, industri strategis, dsb, kerugian akan lebih kecil. Bila angka aktivitas berkisar 10%, maka kerugian akan menjadi $90\% \times \text{Rp } 923 \text{ Triliun}$ atau sekitar Rp 830 Triliun. Apabila PSBB Jabodetabek diperpanjang 2 pekan, maka kerugian nasional akan mencapai $1,5 \times \text{Rp } 830 \text{ Triliun} = \text{Rp } 1.260 \text{ Triliun}$ atau setengah dari anggaran belanja negara pada APBN 2020 (Hadiwardoyo, 2020)

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal memiliki efek terhadap aktivitas ekonomi sebuah pemerintahan. Bretscher & Hsu (2016) Seperti halnya negara Indonesia yang memiliki kebijakan fiskal dengan berbagai jenis kebijakan didalamnya sebagai upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di bumi pertiwi. Jumlah angka kemiskinan yang ada di Indonesia dalam beberapa tahun ini dinilai masih cukup tinggi, terlebih dimasa pandemi saat ini (Habibah et al., 2020).

Dengan asumsi bahwa kebijakan fiskal efektif, itu akan mempengaruhi output, terutama dalam waktu dekat, jadi kita perlu memastikan bahwa itu membantu untuk mencapai tujuan. Prioritas pertama adalah mencegah orang mati. Pemerintah telah mengalokasikan dana dalam jumlah besar untuk menangani pandemi – memasok peralatan medis tambahan, tempat tidur rumah sakit, pekerja medis, dan obat-obatan; menutupi biaya pengobatan orang yang

terinfeksi; dan kompensasi penutupan daerah tertentu dan pelarangan kegiatan ekonomi, dll. Meskipun upaya besar ini, penting untuk dicatat bahwa ini tidak ditujukan untuk memberantas penyakit, melainkan untuk meratakan kurva dan mengurangi jumlah orang yang terinfeksi dan kematian sampai vaksin ditemukan. Dengan demikian, ada jalan panjang di depan sampai ekonomi kembali ke kondisi produktif. Prioritas kedua adalah meminimalkan kerugian kapasitas produksi selama pandemi dan memulihkan produksi sesegera mungkin, mungkin ketika vaksin ditemukan. Ini memerlukan kebijakan tentang skema retensi pekerjaan, tunjangan pengangguran, atau perlindungan sosial yang diperluas. Karena resesi kemungkinan besar akan disebabkan oleh permintaan yang menyusut (terutama untuk komoditas), kebijakan fiskal dapat diarahkan untuk meningkatkan permintaan tersebut. Jika penganggur masih memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi, mereka akan mengaktifkan sektor produksi dan pekerja akan memperoleh pendapatan dari industri yang telah menghidupkan kembali produksi. Dalam hal ini, menuangkan uang ke pasar tidak akan meningkatkan inflasi, terutama dalam waktu dekat, karena uang tambahan akan diimbangi dengan output yang menganggur. Namun, menghasilkan uang 'murah' dengan mengucurkannya tanpa mempertimbangkan respons yang diharapkan dengan cermat akan menyebabkan efek output yang tidak signifikan dalam waktu dekat dan merusak kesinambungan fiskal dalam jangka panjang. Konsekuensi potensial lain yang mengkhawatirkan dari resesi yang berkepanjangan adalah efek histeresisnya – efek upah pekerja sektor swasta di bawah skema cuti atau retensi pekerjaan. Skema ini bertujuan untuk menempatkan pekerja dalam mode siaga, siap bekerja lagi setelah puncak pandemi berlalu, sehingga menghindari efek histeresis dari meningkatnya pengangguran. Efek histeresis juga dapat terjadi pada indikator ekonomi lainnya, termasuk faktor produksi yang berubah: manusia, kelembagaan, pengetahuan dan teknologi, dan modal. Kami tidak tahu apakah faktor-faktor produksi ini akan dikembalikan ke keadaan semula setelah pandemic (Bulow et al., n.d.2020).

Dampak Kebijakan Fiskal Dimasa Pandemi

Wabah COVID-19 yang sedang berlangsung menyebabkan gangguan yang meluas di negara-negara maju di dunia ekonomi. Otoritas moneter dengan cepat bereaksi, dengan Federal Reserve dan lainnya bank sentral utama segera mengaktifkan kembali toolkit Krisis Keuangan 2008-09 mereka. Mengikuti langkah-langkah ini, otoritas fiskal di seluruh dunia mulai merancang dan mengimplementasikan stabilisasi paket untuk membantu mempertahankan neraca rumah tangga dan perusahaan. Pandemi dimodelkan sebagai penghentian tiba-tiba dari sektor layanan intensif kontak. Melalui permintaan agregat eksternalitas, penutupan sektor ini merambat ke sektor non-jasa. Melalui

keterkaitan neraca, juga merambat ke sektor keuangan.

Meningkatnya pengangguran mengarah ke gelombang default, mengganggu intermediasi keuangan dan memperkuat resesi. Guncangan pandemi menghasilkan lonjakan besar dalam tingkat pengangguran, seperti dalam data, rumah tangga peminjam, yang sebagian besar pendapatannya berasal dari pekerjaan dan bergantung pada bank kredit untuk mendanai konsumsi, adalah kelompok yang paling terpengaruh. Saya berasumsi bahwa ada endogenmasuk dan keluar di sektor yang terkena dampak, yang berarti bahwa fluktuasi permintaan dapat memiliki efek persisten dalam kapasitas produktif sektor ini dan ekonomi tidak segerapulihan kembali saat pandemi berakhir. Guncangan yang cukup besar menyebabkan penurunan besar dalam penyerapan tenaga kerja di sektor ini. Penurunan ini mempengaruhi sebagian besar peminjam, yang terkendala dan memiliki marjinal yang sangat tinggi kecenderungan untuk mengkonsumsi. Ketika pendapatan mereka turun karena kehilangan pekerjaan, tingkat default naik. Hal ini membatasi bank, yang pada gilirannya menuntut suku bunga yang lebih tinggi pada pinjaman mereka. Ini dua efek berkontribusi pada penurunan konsumsi non-jasa, yang pada gilirannya memicu penurunan inflasi dan penurunan permintaan tenaga kerja non-jasa. Bank sentral menanggapi ini kejutan dengan menurunkan suku bunga. Suku bunga yang lebih rendah membantu bank dengan menurunkan biaya mereka pendanaan, tetapi akhirnya suku bunga dibatasi oleh ZLB. Jika kejutannya cukup parah, ekonomi menyentuh ZLB dan resesi besar dapat terjadi. Karena masuknya endogen dan keluar di sektor yang terkena dampak, kejutan permintaan ini menghasilkan gelombang default; keluar perusahaan tidak mudah diganti dengan pendatang baru, yang berarti bahwa kejutan besar untuk permintaandi sektor ini memiliki efek terus-menerus pada output, lapangan kerja, dan konsumsi (Surjaningsih et al., 2012).

Hutang Luar Negeri

Tujuan utama dari ekonomi berkembang adalah untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi tetapi karena sistem ekonomi yang lemah dan rendahnya tingkat per kapita mereka tidak dapat mencapai pertumbuhan yang diinginkan. Oleh karena itu mereka memilih utang luar negeri dari lembaga internasional dan lembaga keuangan. Salah satu pertanyaan kebijakan penting adalah bahwa apa yang seharusnya menjadi pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara? Kebijakan pemerintah ekspansif meskipun efektif dalam waktu singkat tetapi mengurangi pertumbuhan jangka panjang dengan menekan investasi swasta dan dengan demikian meniadakan efek positif dari insentif fiskal.

Utang luar negeri dibutuhkan oleh suatu negara untuk meningkatkan kapasitas pertumbuhan dengan memanfaatkannya dalam berbagai proyek

pembangunan, untuk memenuhi kewajibannya dan untuk memenuhi kesenjangan tabungan dan investasi. Utang luar negeri menjadi perhatian besar bagi pembuat kebijakan dan akademisi. Sejauh ini tidak ada konsensus umum tentang utang publik dan hubungan pertumbuhan telah berkembang di antara para peneliti. Di satu sisi dipandang bahwa membawa modal dan pemanfaatan produktif modal ini membantu perekonomian tumbuh lebih cepat. Membawa teknologi yang membantu dalam pertumbuhan industri dan selanjutnya membantu dalam memobilisasi modal manusia dan fisik yang mesin-mesin pertumbuhan. Di sisi lain dipandang bahwa akrual yang berlebihan dari utang luar negeri menghambat pertumbuhan oleh mengungguli investasi swasta (Rauf & Khan, 2017). Hutang luar negeri cenderung memiliki efek yang menguntungkan pada total investasi di suatu negara karena sebagian besar pinjaman luar negeri dilakukan dipermohonan bahwa tabungan domestik tidak cukup untuk membiayai investasi yang

direncanakan pengeluaran. Namun, orang juga dapat berargumen bahwa semua pinjaman luar negeri tidak digunakan untuk tujuan investasi. Selanjutnya, pengeluaran investasi dibiayai dengan pinjaman luar negeri kemungkinan akan menekan investasi yang dapat dibiayai dari sumber daya dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh utang luar negeri terhadap pengeluaran investasi tidak pasti. Pemerintah mengelola asing hutang — berapa banyak yang mereka pinjam dan bagaimana mereka menggunakan dana pinjaman — dapat menghasilkan ditemukan membentuk lintasan pembangunan. Keuntungan produktivitas yang meningkatkan pendapatan datang dari mengadopsi teknologi baru dan membangun infrastruktur untuk mendukung spesialisasi ekonomi yang lebih besar. Keuntungan produktivitas seperti itu membutuhkan investasi, bagaimana pernah, dan tabungan di negara-negara berpenghasilan rendah jarang cukup untuk membiayai proyek yang dibutuhkan. Tabungan asing dengan demikian dapat memainkan peran penting dalam pembangunan. Meminjam dari luar negeri tidak serta merta menghasilkan pembangunan ekonom (Oatley, 2010).

Dampak Hutang Luar Negeri Dimasa Pandemi

Salah satu sumber utama pendanaan untuk pemulihan ekonomi di negara-negara pasca pandemi Covid-19 adalah meningkatnya utang luar negeri. Tapi akibatnya pandemi Covid-19 dan menguatnya tren baru dalam perkembangan ekonomi global, tingkat ketidakpastian telah sangat ditingkatkan. Akibatnya, negara-negara yang secara signifikan meningkatkan jumlah utang luar negeri akan mengurangi tingkat stabilitas makro ekonomi mereka salah satu masalah tersulit dalam perencanaan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 adalah menentukan besaran dana untuk upaya pemulihan di tingkat nasional.

Kesulitannya terletak pada fakta bahwa, di satu sisi, semakin banyak dana yang dapat diarahkan untuk pemulihan ekonomi, maka lebih cepat dapat pulih, namun karena penurunan yang signifikan dalam bagian pendapatan anggaran, tanpa meningkatkan utang publik – yaitu dengan hanya mendistribusikan kembali dana anggaran negara, hibah UE untuk ekonomi pemulihan, dan pendanaan dari program UE yang ada – akan sulit bagi negara-negara UE untuk membiayai pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, negara-negara berencana untuk menutupi sebagian dari biaya pemulihan ekonomi dengan meningkatkan utang publik.

Di sisi lain, untuk menjamin stabilitas makroekonomi di masa depan, negara perlu mengambil memperhitungkan sejumlah faktor ketika menentukan ukuran peningkatan utang publik mereka, karena, karena berbagai alasan, ada tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dari sebelumnya dalam fase saat ini pembangunan ekonomi bertepatan dengan krisis 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Keadaan ini membuat sangat sulit untuk merencanakan peningkatan utang luar negeri untuk membangun kembali ekonomi terdampak pandemi.

Pilihan prioritas pendanaan yang tercantum di atas dalam perencanaan pemulihan ekonomi yang terkena dampak pandemi Covid-19 akan memberikan peningkatan ekonomi nasional daya saing, pembangunan yang stabil, dan kemakmuran dalam jangka menengah dan panjang. Kekhawatiran terbesar adalah skenario pembiayaan di mana sebagian besar dana yang diterima tidak akan digunakan cukup efisien dan akan dihabiskan untuk memecahkan tujuan jangka pendek, misalnya, pada konstruksi atau renovasi fasilitas yang tidak vital bagi masyarakat. Ini tentu saja akan memiliki hal positif dalam beberapa tahun ke depan, tetapi dalam jangka menengah dan panjang akan membatasi pertumbuhan nasional daya saing dan keberlanjutan ekonomi terlalu kuat (Prohorovs, 2020).

C. METODOLOGI

Penelitian ini berupa deskriptif, yang akan mendeskripsikan suatu kejadian atau fenomena untuk memperoleh hasil yang akurat dan di interpretasikan dengan kata-kata tertulis (Soendari, 2012). Dengan menggunakan *library research* atau study literatur (Surani, 2019), yakni mencari sumber *reference* teori yang sesuai dengan kasus atau sebuah permasalahan yang dikemukakan. Atau dapat dikatakan, cara yang dapat menyelesaikan persoalan melalui penelusuran sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini teknik analisis kualitatif dengan metode berfikir induktif. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data diperoleh, selanjutnya dikembangkan sebagai hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang

dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul (Huberman & Miles, 1992). Berdasarkan uraian diatas maka untuk menganalisis data menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk penelitian sebelumnya kemudian data tersebut dianalisis dengan cara berpikir induktif yaitu secara khusus dari informasi yang ada serta meresume hasil riset sebelumnya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui pengaruh APBN, kebijakan fiskal, dan hutang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi dimasa pandemi. Dengan sedikit stimulus moneter yang tersedia, dan tingkat utang dimasa pandemi yang tinggi pada akhirnya menahan pembuat kebijakan fiskal dipaksa untuk berjalan di garis tipis antara menjalankan stimulus ekonomi dan mempertahankan keyakinan itu dalam jangka panjang agar solvabilitas fiskal tidak terancam. Tanggapan kebijakan moneter dan fiskal terhadap pandemi telah termasuk pusat pemotongan suku bunga kebijakan bank dan pelonggaran kuantitatif, relaksasi aturan utang dan defisit, pengeluaran prioritas ulang, alokasi dana ekstra-anggaran untuk respons pandemi, uang tunai transfer, bantuan makanan dan bantuan sosial langsung lainnya untuk rumah tangga yang rentan dan dukungan untuk usaha kecil dan menengah.

Dalam hal ini mengadaptasikan model makro ekonomi untuk mensimulasikan efek makro ekonomi dari pandemi dan mempelajari efek dari berbagai jenis instrumen kebijakan fiskal. Guncangan pandemi menghasilkan lonjakan besar dalam tingkat pengangguran, seperti dalam data, rumah tangga peminjam, yang sebagian besar pendapatannya berasal dari pekerjaan dan bergantung pada bank kredit untuk mendanai konsumsi, adalah kelompok yang paling terpengaruh. Dalam pertumbuhan Ekonomi, dimasa pandemic saat ini, memang perlu dihadirkan sebuah kebijakan, guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. Sukses dalam pembangunan adalah hal yang utama sasaran program pemerintah suatu negara untuk membawa negaranya menuju kemajuan, di mana Negara yang mengalami optimal perkembangan dapat dilihat dari segi bagaimana sukses pemerintah dalam mempromosikan perubahan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut .

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan penelitian sebagai berikut:

- I. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan struktur ekonomi.

2. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode pengamatan tahun 2019-2020 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,07% per tahun dan persentase penduduk miskin di Indonesia cenderung mengalami peningkatan juga dengan nilai rata-rata sebesar 7,88% per tahun.
3. Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan penduduk dalam perubahan struktur ekonomi.
4. Faktor- faktor yang mempengaruhi perubahan struktur di bagi menurut sektornya:
 - a. Sektor Primer: pendapatan perkapita, jumlah penduduk dan kontribusi ekspor import merupakan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap perubahan struktur sektor primer.
 - b. Sektor Industri: pendapatan perkapita, jumlah penduduk, periode waktu dan kontribusi ekspor import merupakan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap perubahan struktur sektor industri.
 - c. Sektor Utilitas: pendapatan perkapita dan kontribusi ekspor import merupakan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap perubahan struktur sektor utilitas.
 - d. Sektor jasa: pendapatan perkapita, periode waktu dan jumlah penduduk merupakan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap perubahan struktur sektor jasa.
5. Perubahan struktur ekonomi yang diawali dengan pertumbuhan ekonomi yang kemudian berdampak pada perubahan pola konsumsi masyarakat relative minim, hanya terjadi pergeseran di tahun 1996-1997 sehingga menyebabkan kemiskinan.
6. Pada tingkat nasional dinamika tingkat kemiskinan di Indonesia seringkali tidak sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa periode di mana pertumbuhan ekonomi diwarnai dengan peningkatan kemiskinan.
7. Tingkat kemiskinan yang terjadi dalam ruang lingkup sektor usaha yang bersangkutan (dalam hal ini diukur dengan HCR dan IGR sektoral) pada umumnya relatif tinggi. Namun jika HCR dibobot dengan employment share (diukur dengan HCR tertimbang) dan IGR dibobot dengan porsi penduduk miskin di masing-masing sektor usaha terhadap penduduk miskin Indonesia (diukur dengan IGR tertimbang), terlihat bahwa kemiskinan di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan adalah yang paling tinggi.
8. Hasil perhitungan tingkat kemiskinan sektoral-regional menunjukkan bahwa hampir di semua daerah sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan merupakan penyumbang terbesar bagi tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia.

9. Pemerintah Pusat maupun Daerah hendaknya melakukan upaya peningkatan produktivitas sektor pertanian dengan mempercepat terjadinya transformasi pertanian (*agricultural transformation*) karena secara statistik terbukti bahwa sektor pertanian menjadi sektor yang efektif dalam mengurangi kemiskinan. Agroindustri pe-desaan merupakan sub sektor industri yang paling cocok dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain efektif dalam mengurangi angka kemiskinan melalui peningkatan pendapatan di sektor pertanian dan peluang menciptakan kesempatan kerja di luar sektor pertanian.
10. Struktur ekonomi berkontribusi langsung dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan sebesar 40 %, sedangkan pengaruh tidak langsung struktur ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja hanya sebesar 38 %. Hal ini berarti struktur ekonomi berpengaruh langsung terhadap tingkat kemiskinan dapat diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2013). Teori-Teori Pembangunan Ekonomi. *Yogyakarta: Graha Ilmu*.
- Alfarabi, M Andi, Hidayat, M. S., & Rahmadi, S. (2014). Perubahan struktur ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan di provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, *1*(3), 171.
- Alfarabi, M Andri, Hidayat, M. S., & Rahmadi, S. (2014). *Perubahan Struktur Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi M.Andri Alfarabi, M.Syurya Hidayat, Selamat Rahmadi Program Magister Ilmu Ekonomi Fak.Ekonomi Universitas Jambi*. *1*(3), 171–178.
- Arham, M. A. (2014). Desentralisasi Fiskal dan Perubahan Struktur Ekonomi: Studi Perbandingan Kawasan Sulawesi dan Jawa. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, *18*(4), 431–451.
- Atalay, R. (2015). The education and the human capital to get rid of the middle-income trap and to provide the economic development. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, *174*, 969–976.
- Fadli, F. (2016). Adakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah? *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, *16*(2).
- Hasan, M. (2017). *Jurnal Economix Volume 5 Nomor 1 Juni 2017*. *5*(1), 143–154.
- Huberman, & Miles. (1992). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif.

- Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 02(1998), 1–11.
- Iqbal, M., & Mawaddah, H. F. (2017). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan , dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Metro Tahun 2007-2017 dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 1(1), 1–22.
- Jonnadi, A., Amar, S., & Aimon, H. (2012). Analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(1).
- Kusreni, S. (2009). PENGARUH PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI TERHADAP SPESIALISASI SEKTORAL DAN WILAYAH SERTA STRUKTUR PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTORAL UNTUK DAERAH PERKOTAAN DI JAWA TIMUR. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 19(1).
- Nangarumba, M. (2015). *Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi , Upah Minimum Provinsi , Belanja Modal , dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014*. 7(2), 9–26.
- Noviarita, H., Kurniawan, M., & Nurmalia, G. (2021). *Analisis Halal Tourism dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung*. 7(01), 302–310.
- Nugroho, S. B. M. (2016). Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 29(2).
- Pangiuk, A. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Kemiskinan di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 2(2), 44–66.
- Purnamasari, F. (2017). Pertumbuhan Ekonomi: Investasi Pemerintah Dan Manajemen Investasi Dalam Perspektif Islam (Studi Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung). *Jurnal Manajemen Indonesia*, 17(1), 13.
<https://doi.org/10.25124/jmi.v17i1.859>
- Saefurrahman, G., Suryanto, T., & Ekawulandarisiregar, R. (2017). *Pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor industri pengolahan*. 1(1), 1–18.
- Safuridar, S. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur. *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 1(1).
- Setiawan, I. (2016). Role of Islamic Banking and Conventional Against Poverty with The Dual Banking System. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 32(2), 353. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v32i2.1916>
- Soendari, T. (2012). Metode Penelitian Deskriptif oleh Tjutju Soendari. *Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka* 17.
- Surani, D. (2019). Studi Literatur: Peran Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*, 2(1), 456–469.

- Suselo, S. L. (2008). *KEMISKINAN DI INDONESIA :*
- Suselo, S. L., & Tarsidin, T. (2008). Kemiskinan di Indonesia: Pengaruh pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, *11*(2), 155–194.
- Suwarni, E. (2006). Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia. *Journal of Economics and Development*, *4*(1), 19–29.
- Syahputra, R. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, *1*(2), 183–191.
- Wahid, A. N., Jamel, S. Bin, Noviarita, H., & Anggraini, E. (2020). Assessing Sharia Monetary Instruments Against Country Economic Growth. *Jejak*, *13*(2), 307–318. <https://doi.org/10.15294/jejak.v13i2.23754>

- Zuhdiyaty, N., & Kaluge, D. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, *11*(2), 27–31.